

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah.

Dalam upaya memperbaharui kualitas demokrasi perwakilan yang akan dikembangkan di tanah air, dihadapan kita tersedia suatu proses bagi terselenggaranya perubahan dalam harmoni, yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum 2004 merupakan tonggak sejarah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, karena untuk pertama kali akan dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, selain pemilihan anggota DPRD tingkat II, DPRD tingkat I dan DPR RI. Penerapan sistem proporsional terbuka merupakan salah satu daya tarik Pemilu 2004, selain pemilihan presiden langsung yang akan digelar beberapa bulan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu 2004 tersebut merupakan peluang emas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menyusun lembaga-lembaga negara yang terbaik. Salah satu hal yang paling mendasar dari perbedaan Pemilu 2004 dengan sebelumnya adalah berubahnya sistem dari proporsional tertutup menjadi proporsional dengan daftar calon terbuka untuk Pemilu DPR dan DPRD memungkinkan rakyat memilih gambar partai berikut calon anggota DPR dan DPRD atas dasar pilihannya sendiri. Mekanisme ini akan mengakhiri tindakan rakyat membeli kucing dalam karung, sebagaimana berlaku dalam sistem proporsional tertutup dimana rakyat

hanya memilih gambar parpol, sementara calon anggota legislatif sepenuhnya ditentukan oleh DPP parpol. Hal ini berakibat pula pada perubahan pada aturan, teknik, dan tata cara pemilihan. Untuk sistim pemilihan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diberlakukan sistim distrik berwakil banyak, sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden berlaku sistim pemilihan secara langsung.

Dengan demikian, sosialisasi informasi Pemilu dan Pendidikan memilih menjadi sangat krusial karena memiliki makna pembelajaran bagi pendidikan politik rakyat, keberhasilan sosialisasi akan bermuara pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang mendapatkan dukungan dan partisipasi politik seluruh elemen masyarakat.

Tugas sosialisasi bukan hanya merupakan tugas KPU, semua unsur dalam masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam sosialisasi Pemilu 2004 agar penyelenggaraan Pemilu dapat berhasil dan berkualitas. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM hasil Pemilu, jika masyarakat menentukan pilihannya pada calon yang berkualitas, jelas akan berpengaruh pada kualitas hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam program sosialisasi Pemilu tersebut ada dua target yang akan diraih, yang utama adalah agar masyarakat mendapatkan kesadaran ideologis terhadap pentingnya Pemilu itu sendiri dan bukan merupakan hasil mobilisasi belaka. Target kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap teknis pencoblosan dalam Pemilu 2004. Aktivitas konstituen memilih nama calon legislatif, alih-alih hanya memilih tanda gambar, diyakini dapat meningkatkan kadar representativitas wakil rakyat. Dengan mencoblos nama orang menjadi jelas

siapa mewakili siapa sampai kapan dan untuk urusan apa. Lebih dari itu legitimasi wakil rakyatpun menjadi kuat karena lebih memungkinkan terjalannya kebersamaan didalam kepentingan (*the commonnessin interest*) antara wakil rakyat dan konstituen

Pengakuan sejumlah konstituen di beberapa daerah, bahwa mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan para wakil mereka, baik yang duduk di DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengisyaratkan bahwa sebagian pemilih telah mengalami *alienasi* (keterasingan) ditengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan politik nasional. Pada saat yang sama sebagian wakil rakyat, yang senantiasa mengatasnamakan rakyat, dihinggapai gejala "*deprivasi spiritual*", yakni tercabutnya pikiran mereka dari pikiran dan aspirasi konstituennya.

Kasus yang paling sering mencuat jalan-jalan ke luar negeri yang beralih studi banding yang kerap dilakukan anggota DPR atau DPRD adalah satu dari sekian agenda yang dinilai penting oleh para wakil rakyat, namun diragukan urgensinya oleh konstituen mereka. Contoh lain adalah unjuk rasa yang kerap dilakukan elemen masyarakat yang mengaku kecewa karena parpol pilihan mereka telah mengingkari janji-janjinya semasa kampanye untuk memperjuangkan kepentingan mereka. (CIVICUS, 2003: ii)

Peran Jawa Barat tentu saja tidak bisa dilewatkan begitu saja, rakyat pemilih di provinsi ini memiliki peran yang menarik karena beberapa hal, Jawa barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak, tentu ditingkat nasional memiliki nilai representasi yang berbeda dengan daerah-

daerah lainnya, disamping itu para politikus yang mewakili provinsi ini (seharusnya) memiliki wawasan dan sikap politik yang elegan, demokratis dan plural sebagaimana digambarkan oleh peta hasil pemilu legislatif yang lalu.

Pengalaman lima tahun terakhir, justru menunjukkan hal-hal yang belum menggemirakan, dalam beberapa aspek pembangunan secara nasional, prestasi yang telah dicapai propinsi Jawa barat berada dipertengahan. Sejumlah propinsi lain telah berhasil melampaui capaian yang diraih Jawa barat secara mencolok. Ini tantangan yang harus dijawab positif dalam hari-hari yang panjang ini.

Kalau selama lima tahun terakhir proses otonomi daerah di Jawa Barat (seperti juga di provinsi lain) belum berhasil secara maksimal, dalam lima tahun mendatang persoalan-persoalan itu harus dapat dibenahi. Otonomi daerah adalah sebuah cita-cita yang cukup lama hanya menjadi impian. Sayangnya, begitu datang kesempatan untuk dilaksanakan, yang muncul justru euforia yang berlebihan. Akibatnya, terjadilah berbagai ekses yang dampaknya masih akan membekas cukup lama. Hal ini berpulang kepada semua pihak baik legislatif, yudikatif, eksekutif dan kita semua sebagai anggota masyarakat. (Pikiran Rakyat, 30-08-2004)

Dalam negara yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi, setiap warganegara berhak untuk ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan, kepentingan warganegara menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemerintah negara yang berkedaulatan rakyat, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian.

Pembangunan politik bertujuan menciptakan sistim politik yang demokratis, Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha penataan segala segi kehidupan politik (sistem politik), baik struktur maupun fungsi atau mekanisme politiknya, serta semua komponen atau unit-unit dari sistim politik pada tataran kehidupan politik formal dan informal, untuk dikembangkan secara proporsional, diatas landasan atau kerangka ideal yang telah disepakati bersama.

Secara substansial, meminjam Francis Fukuyama, sebuah negara akan disebut demokratis dan maju jika negara itu dapat membebaskan rakyatnya dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan melalui demokratisasi.

Dalam mengkonsepsikan demokrasi, Huntington (1991) mengacu pada tradisi pemikiran demokrasi dari Schumpeter (1942) yang mengajukan "metode demokratis" dalam arti prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Bertolak dari tradisi tersebut Huntington (1991: 5) memberikan batasan sistem politik abad ke-20 dinilai demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan didalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu untuk memilih para wakil rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi sebagai "esensi demokrasi" Namun demikian hal itu bukanlah segalanya karena setelah pemilu terbentang tuntutan lainnya, yakni pengakhiran rezim non demokratis, penguatan rezim demokratis

dan kemudian mengkonsolidasikan sistem yang demokratis. Karena pemilihan umum berkala yang jujur dan adil dianggap sebagai syarat minimal dari suatu proses demokrasi (Huntington, 1999:8).

Pada saat ini dunia termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokratisasi ketiga yang sangat spektakuler karena melanda seluruh dunia, isu demokratisasi yang menonjol pada gelombang ketiga ini antara lain hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Selain itu karena proses demokratisasi ini menyangkut partisipasi warganegara dalam proses politik, maka penyiapan warganegara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini.

Sebagaimana diyakini bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Oleh karena itu, pendidikan PKn seyogyanya menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam arti yang luas karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia. Proses demokratisasi yang harus dikembangkan bukanlah hanya untuk berdemokrasi hari ini, tetapi lebih jauh lagi untuk demokrasi dihari esok (Winataputra, 108).

Pendidikan mempersiapkan generasi muda sebagai penyanggah nilai-nilai baru yang dituntut dalam era reformasi, John Dewey dalam bukunya *The School and Social Progress* mengatakan:

Education is the fundamental method of social progress and reform. All reforms which rest simply upon the enactment of law, or the threatening of certain penalties, or upon changes in mechanical or outward arrangements, are transitory and futile.

Education is a regulation of the process of coming to share in the social consciousness; and that the adjustment of individual activity on the basis of this social consciousness is the only sure method of social reconstruction.

Pendidikan adalah metode dasar dari perkembangan dan reformasi sosial.

Semua reformasi yang membekukan pemberlakuan perundangan atau penolakan+ bagi hukum tertentu, atau perubahan mekanisme atau keluar dari rancangan yang merupakan kegagalan dan kesia-siaan. Pendidikan adalah sebuah aturan dari proses untuk mempersatukan kesadaran sosial; dan penyesuaian diri aktivitas seseorang atas dasar kesadaran sosial adalah suatu metode yang meyakinkan dari rekonstruksi sosial.

Pendidikan politik sudah saatnya menjadi sebuah kebutuhan dasar dalam dunia pendidikan di Indonesia, sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman politik warganegara Indonesia semakin tinggi, rendahnya pendidikan politik rakyat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi warganegara dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Tingkat partisipasi dan reaksi-reaksi individu terhadap sistem politik, untuk sebagian, ditentukan oleh tanggapan kognitifnya. Dalam kajiannya tentang partisipasi politik, Sherman dan Kohler (1987) menegaskan adanya indikasi pengaruh kognisi warganegara terhadap tingkat partisipasi politik dan reaksi-reaksinya tentang mekanisme sistem politik khususnya dan pembangunan politik pada umumnya.



Keefektifan pemahaman konsep Pemilu bagi pemilih pemula dinilai penting, oleh karena itu urgensi pengembangan kognisi politik siswa SMA sebagai bagian dari generasi muda dalam konteks pembangunan sistem politik yang sehat, maupun menyangkut peranan yang mungkin dimainkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kedudukannya sebagai salah satu elemen infrastruktur politik. Di Jawa barat khususnya kota Bandung dapat diketahui jumlah siswa sekolah menengah atas tahun 2003/2004 (kelas tiga SMA negeri dan Swasta) mencapai 18.977 siswa, dengan rincian; laki-laki 8.954 dan perempuan 10.023 siswa. Sedangkan jumlah siswa kelas tiga baik SMA Negeri maupun Swasta yang berusia antara 16-18 tahun mencapai 39.384 siswa Di Kota Bandung pendidik (guru) menurut status kepegawaian dan golongan tahun 2003/2004 sebagai pengajar tetap dan tidak tetap di SMA Negeri/Swasta berjumlah 4.400 orang. (Statistik Pendidikan, 2003/2004)

Pemilu tahun 2004 merupakan sebuah peristiwa politik yang tepat untuk melakukan pendidikan politik kepada para siswa SMA sehingga mereka mampu memandang dan memberi penilaian atas suatu fenomena politik dengan baik, pemahaman mengenai Pemilu dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn sebagai media pendidikan politik.

Pemilih tetap pada Pemilu 2004 pada pemilihan umum Presiden dan wakil presiden jumlahnya mencapai 153.357.307 dari jumlah tersebut diperkirakan terdapat lima juta pemilih yang tidak jelas identitasnya (ghost voter) dan baru terdeteksi sekitar 400 ribu.

Pemilih Jawa Barat, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat tambahan sebanyak 1.023.144 pemilih. Apabila pada pemilu Legislatif terdaftar 26.119.890 pemilih, maka pada pemilu presiden tercatat sebanyak 27.143.034 pemilih, tambahan terbesar terdapat pada pemilih di Bogor sebanyak 147.645 pemilih, disusul Cirebon bertambah 126.697 pemilih.

Di kota Bandung sendiri terdapat tambahan pemilih sebesar 55.000 sehingga berjumlah sekitar 2.794.272 pemilih. Menurut KPU Pusat, pemilih tambahan sebagian besar adalah pemilih pemula atau mereka yang berusia 17 tahun atau sudah menikah bertepatan pada pelaksanaan pemilu presiden 5 Juli 2004. Sebagian kecil pemilih tambahan berasal dari kalangan polisi atau tentara yang pensiun. (Pikiran Rakyat, 26-08-2004).

Pemilih Pemula menduduki posisi penting dalam Pemilihan umum 2004, pasalnya, ditilik dari jumlahnya, Pemilih Pemula mencapai 34% dari keseluruhan pemilih di Indonesia yang mencapai 147.219 juta jiwa, pendidikan bagi pemilih pemula dapat menjadi titik tolak perilaku mereka dalam Pemilu berikutnya sehingga pemilih pemula harus digarap dengan serius.

Pemilih Pemula harus memperoleh pendidikan Pemilu yang benar dan tepat sehingga dapat mengubah kebiasaan partai politik, misalnya, menolak mobilisasi massa yang selama ini masih menjadi kebiasaan Parpol dalam berkampanye untuk menjaring massa. Dapat dikatakan, pemilih pemula telah memberikan pendidikan politik bagi Parpol, contoh perilaku Parpol lainnya dapat dibenahi oleh pemilih pemula adalah kebiasaan memberikan uang dengan imbalan



Pemilih.Pemilih dapat menolak pemberian uang tersebut yang diiringi dengan penolakan terhadap Parpol yang bersangkutan.

Pendidikan bagi pemilih pemula diarahkan untuk mempertajam daya kritis pemilih.Sifat kritis akan mendorong Pemilih untuk berfikir matang dalam menjatuhkan pilihan mereka. Pemilih yang kritis juga akan menentukan pilihan mereka bukan dengan pertimbangan emosional, diantara 2.794.272 pemilih tetap di Kota Bandung, 20% diantaranya adalah Pemilih Pemula. Angka ini akan sangat mempengaruhi kehidupan politik Indonesia kedepan, Pemilih pemula mempunyai peluang untuk tidak menggunakan hak pilihnya/Golput. Berdasarkan simulasi pemilu yang dilakukan KPU pada 7 SMA di Bandung pada Desember 2003, 3 sampai 5% diantaranya adalah Golput.Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak dalam pemahaman Pemilu yang rasional, terutama kepada murid-muridnya sebagai pemilih pemula.

2. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

2.1. Rumusan Masalah

Salah satu kelompok peserta pemilih Pemilu adalah sebagian siswa SMA sebagai pemilih pemula yang pada tahun 2004 berusia 17 tahun atau lebih yang tersebar di seluruh Indonesia, pengalaman tahun-tahun yang lalu dengan berbagai alasan, pendidikan politik bagi siswa sekolah seakan-akan diharamkan, walaupun pelajaran politik diberikan sekedar kognisi tidak sampai pada afeksi, apalagi sampai psikomotor, padahal di luar sekolah, siswa khususnya yang telah memiliki hak pilih merupakan masyarakat yang harus

terlibat dalam politik karena mereka memiliki hak pilih dan diikutsertakan sebagai pemilih. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengkaji unsur-unsur pendidikan yang mana, dalam hal ini tentang Pemilu yang secara konseptual memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai media pendidikan politik, kajian ini merupakan suatu penelitian terhadap pemahaman konsep Pemilu yang potensial menjadi pendidikan politik.

Berdasarkan kajian diatas, maka fokus permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: "*Bagaimana pemahaman pemilih pemula tentang konsep Pemilihan Umum pada Sekolah menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung?*"

2.2. Fokus Masalah Penelitian

Mencermati latar belakang pemikiran penelitian tersebut diatas, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman konsep pemilihan umum dalam kurikulum PKn Sekolah Menengah Atas?
2. Bagaimana siswa menyikapi proses pembelajaran PKn dalam konsep Pemilu?
3. Apakah proses pembelajaran yang berlangsung mampu mengembangkan kognisi tentang konsep pemilu bagi siswa?
4. Hal-hal apa yang diharapkan dalam pembelajaran PKn bagi peningkatan pemahaman Pemilihan Umum?

3. Definisi Operasional Penelitian

Pemahaman adalah kemampuan individu untuk menyebutkan kembali atau menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang sesuatu benda atau kejadian, menganalisa, dan menginterpretasikannya

Kemampuan menerangkan sesuatu dengan kata-kata sendiri, mengenali sesuatu yang dinyatakan dengan kata-kata yang berbeda dengan yang terdapat dalam buku teks, menginterpretasikan atau menarik kesimpulan, misalnya dari tabel atau data, grafik, dan sebagainya (Baharuddin, 115)

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum)

Pemahaman Pemilu adalah persepsi cerdas terhadap manusia dalam hubungannya dengan negara, sehingga dalam menentukan pilihannya berdasarkan dominasi legal rasional, yaitu menentukan pilihan secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan rasionya

Pemilih Pemula adalah pemilih atau mereka yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah bertepatan pada pelaksanaan pemilu

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tujuannya adalah membentuk warganegara yang baik yaitu warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warganegara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan

juga masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*). Selain itu sebagai warganegara Indonesia yang baik juga diharapkan memiliki sikap disiplin pribadi maupun berfikir kritis, kreatif, dan inovatif, agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warganegara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behaviour and desirable personal qualities*).

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian.

4.1.1. Tujuan umum:

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pemahaman pemilih pemula terhadap konsep Pemilu melalui pengembangan pendidikan demokrasi dan partisipasi politik melalui metode belajar-mengajar PKn yang potensial untuk mengembangkan partisipasi aktif warganegara

4.1.2. Tujuan khusus:

Penelitian ini bertujuan untuk:

4.1.2.1. Mengetahui kemampuan pemahaman konsep pemilihan umum dalam kurikulum PKn Sekolah Menengah Atas

4.1.2.2. Mengetahui siswa menyikapi proses pembelajaran PKn dalam konsep Pemilu

4.1.2.3. Mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung dalam mengembangkan kognisi tentang konsep pemilu bagi siswa

4.1.2.4. Mengetahui hal-hal yang diharapkan dalam pembelajaran
PKn bagi peningkatan pemahaman Pemilihan Umum

4.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis meyakini adanya manfaat sebagai berikut:

- 4.2.1. Memperkaya khasanah pengembangan pembelajaran PKn yang demokratis dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran PKn di sekolah sesuai dengan situasi dan kebermaknaannya.
- 4.2.2. Secara praktis hasil dan temuan penelitian dapat dijadikan salah satu alternatif oleh para pengambil kebijakan (*decision maker*), pengelola satuan pendidikan untuk dikembangkan dan diseminasikan pada jenjang SMA dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan mutu layanan pembelajaran serta hasil belajar siswa
- 4.2.3. Membuka peluang bagi para pakar dan peneliti lain untuk menindaklanjuti penelitian ini sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang potensi pemanfaatan unsur-unsur pemahaman siswa tentang konsep Pemilu dalam peningkatan kualitas pembelajaran PKn di sekolah.

5. Kerangka Pemikiran

5.1. Gagasan Dasar Penelitian.

Komitmen terhadap upaya peningkatan kualitas berkehidupan demokrasi di Indonesia sedang mengalami tahap memuncak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada masa yang akan datang instrumentasi dan praktis kehidupan demokrasi di Indonesia akan mengalami penyempurnaan yang terus menerus sejalan dengan dinamika partisipasi seluruh warganegara sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam masyarakat.

Prakondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Peran pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai kondisi ideal kehidupan demokrasi, tanpa Partisipasi dari masyarakat luas, maka kehidupan demokratis hanya utopis belaka yang tak akan pernah terwujud dalam realitas yang sesungguhnya. Dalam rangka menumbuh kembangkan semangat berpartisipasi itu, peran pendidikan tak dapat diabaikan, melainkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan (Ernes Gelner). Karena pengembangan *civil society* atau "masyarakat madani" bagi Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses demokratis, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif dari warganegara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya, maka tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi warganegara, yang memungkinkan setiap warganegara dapat belajar demokrasi melalui praktik kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis

kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang, atau *learning democracy, in democracy, and for democracy* (APCEC : 2000), dengan demikian kualitas berkehidupan demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia semakin meningkat.

Implikasi dari pandangan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warganegara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawabnya sebagai warganegara yang demokratis. Pendidikan tersebut menurut Gandal dan Finn (1999:3) *seek not only to familiarize people with the precepts and practice of democracy, but also to produce, inquisitive, and analytic in their out look*, yakni pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warganegara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh kedepan. Namun demikian diingatkannya bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai *isolated subject*, yang diajarkan dalam waktu terjadwal cenderung diabaikan lagi, tetapi, *it is linked to nearly everything else that students learn in school-whether it be history, civic, ethics or economics-and too much that goes on outside of school*. Jadi, janganlah dilihat sebagai mata pelajaran yang terisolasi, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, etika, atau ekonomi, dan lebih banyak terjadi di luar sekolah, dengan kata lain *good democracy education is a part of good education in general*, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum (Winataputra: 112).

Pada bangsa-negara yang baru muncul dan negara-negara yang otokratik, program ini secara pragmatik-prosedural dikelola secara khusus dan diawasi serta diselenggarakan langsung oleh pemerintah, yang dalam hal ini, *the ruling class* yang manggung tanpa memberi hak kewenangan partisipasi pihak/lembaga swadaya masyarakat. Fokus target pembelajaran dititik beratkan kepada pembekalan yang cenderung hapalan-substansiil yang umumnya terdiri atas doktrin ideologi negara/politik, norma yuridis formal, tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga dan masyarakat (yang akhirnya merupakan tatanan keharusan dan kewajiban), konsep nasionalisme sempit dan kefanatikan lain yang sejenis.

Hal senada pernah diungkapkan sejumlah peneliti sebagaimana dinyatakan Cogan dan Derricott (1998), "*it has often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideology hegemony rather than of education*"

Pola prosedurnya bukan kearah memberi kemudahan, kelancaran, keberhasilan (facilitating) proses internalisasi-personalisasi substansi serta pembinaan pengembangan potensi diri atau kemampuan belajar (*continuing learning skills*), kualifikasi program pendidikan politik menjadi "program indoktrinasi politik" yang maha "*super power*", namun kelak pada titik kritis terbawah rezim/sistem politik, program ini akan turut terhujat dan tergusur, maka oleh karenanya, belajar dari pengalaman terdahulu, kita jangan

menciptakan dan membina lagi jenis dan pola pendidikan politik seperti itu.
(Djahiri, 90)

Masalah pendidikan, khususnya *civic education dan community civic*, pada pelaksanaannya (secara programatik dan proseduralnya) menjadi salah kaprah, target harapan dan isi pesan yang secara filosofis luhur dan baik (membina WNI berjiwa Pancasila dan berbudaya Indonesia). Pola prosedural yang semula membina proses internalisasi dan personalisasi isi pesan luhur membelok menjadi proses men-drill yang indoktrinatif, berisi dalil dan tugas keharusan ideologi politik yang dimaui penguasa. Dari target membina WNI yang utuh penuh kesadaran akan hak-kewenangan, bertanggung jawab dan demokratis melahirkan produk insan WNI yang hapal dalil politik, serta tanpa *reserve* kepada ideologi dan penguasa/pimpinan.

PKn 1999 sebagai transisi ke PKn 2003 makna PKn sebagai bagian pendidikan Ilmu kewarganegaraan atau PKn di manapun dan kapanpun sama/mirip, yakni program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat mantap, sadar dan mampu membina serta melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat dan bangsa negaranya, taat asas/ketentuan (*rule of law*), demokratis dan partisipatif aktif-kreatif-positif dalam kebhinekaan kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (*civil society*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang

terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati diri masyarakat bangsa dan negara.

WNI yang baik sebagaimana diungkapkan oleh (Cogan 1998) ialah sebagai warganegara yang memiliki sejumlah ciri utama, yakni (1) rasa kepribadian/jati diri mandiri (*a sense of identity*) baik sebagai insan ilmiah, sosial maupun kebangsaan; ciri mandiri ini bisa dilihat dari berbagai dimensi (geografi, etnis, agama), serta mampu menuju kehidupan yang globalistik; (2) rasa nikmat akan sejumlah haknya baik legal, political, socio-economical rights dan mampu menjalankan secara baik dan benar; (3) rasa tanggung jawab akan kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang menjadi keharusannya, sehingga selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dengan privat serta menjelmakan tanggung jawab (*responsibilities*) menjadi (*obligation*) dan tugas keharusan (*duties*); (4) minat dan keterlibatan akan *public affairs* (kepentingan umum) sehingga siap, mau dan mampu berpartisipasi secara aktif, kreatif, positif/konstruktif, dan demokratis; (5) kemampuan untuk menyerap/menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*basic societal values*); sehingga mampu menjalin dan membina kerja sama, kejujuran, kedamaian, serta rasa cinta dan kebersamaan dalam mempersiapkan hari esok (*futuristic orientation*).

Dalam pandangan Huntington (1982) model demokrasi terbaik meliputi 3 (tiga) tahap substansial, yakni *tahap pertama*, perumusan dan pengembangan identitas nasional. *Tahap kedua*, pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif, dan *tahap ketiga* adalah partisipasi politik.

Menurut penulis ketiga tahap tersebut bersifat saling membangun atau melengkapi, utuh menyeluruh (*integral comprehensive*), ketiadaan salah satu tahap, atau ketidak optimalan salah satu tahap, akan berimplikasi negatif pada tahap lainnya.

Pemilu merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam negara demokrasi, namun tidak berarti bahwa negara yang sudah melaksanakan pemilu dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis, Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis, belum tentu melahirkan Kepala Negara dan wakil rakyat yang demokratis, asumsi ini diperkuat oleh bukti pemilu 1999 di Indonesia yang dirancang secara demokratis, ternyata gagal melahirkan wakil rakyat yang demokratis. Apabila bila peraturan dan pelaksanaan Pemilu tidak mencerminkan semangat demokrasi, maka kemungkinan besar hasilnya pun hanya melahirkan wakil rakyat yang miskin akan naluri demokrasi. (Mulyasana, 182)

Kini Indonesia sedang memasuki era baru yang diharapkan lebih demokratis sehingga perlu membuka wacana baru tentang pemilihan presiden. Salah satu usulan adalah untuk mengadopsi sistem pemilihan presiden langsung; sistim ini memungkinkan rakyat untuk memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat presiden pilihannya. Sistim ini oleh para pendukungnya dianggap sebagai suatu mekanisme yang demokratis dan merupakan solusi untuk mencegah distorsi yang terjadi pada sistim pemilihan presiden yang sekarang berlaku.

6. Metode dan Tehnik Penelitian.

6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dengan perkataan lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan (Nana Sudjana dan Ibrahim, 1998:65)

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi perhatian yaitu pemahaman pemilih pemula tentang konsep pemilu, untuk kemudian digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adanya

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

6.1.1. Merumuskan masalah

Bagaimana Pemahaman pemilih pemula tentang konsep
Pemilihan Umum

6.1.2. Menentukan Jenis informasi yang diperlukan

Dalam hal ini peneliti memerlukan Informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan/masalah yang telah dirumuskan diatas berupa informasi:

6.1.2.1. Informasi yang berkenaan dengan kondisi: - Lingkungan

Sekolah, Program Sekolah, Program Guru, Siswa

6.1.2.2. Informasi yang berkenaan dengan kendala-kendala yang

dihadapi: sekolah, guru dan siswa



6.2. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan empat cara pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuesioner
4. Studi dokumentasi

6.3. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Menentukan prosedur pengumpulan data, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Membuat instrument atau alat pengumpul data seperti: observasi lingkungan belajar mengajar dan kelas, wawancara dengan Kepala Sekolah, guru, dan siswa; kuestioner bagi guru dan siswa
2. Mencari sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Sumber informasi yang *pertama* adalah siswa kelas III SMAN 3, 7, 8, dan SMAN 10 di Kota Bandung dengan menggunakan observasi kelas dan lingkungan belajar siswa, wawancara pada guru-guru pengajar PKn dan siswa-siswi di sekolah yang dijadikan objek penelitian, serta penyebaran kuestioner dan studi dokumentasi.

7. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif dengan menggunakan data dari responden, observasi lapangan, wawancara, kuesioner dan studi dokumenter.

Pendekatan analisis pertama dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pembelajaran PKn yang demokratis sekaligus menggali pendapat dan harapan responden, pendekatan ini dipakai untuk membantu peneliti dalam memberi makna terhadap hasil penelitian.

Populasi penelitian terdiri atas siswa kelas 3 SMAN 3, 7, 8, dan SMAN 10 yang diambil dari data tahun terakhir. Untuk memperoleh sampel representatif dilaksanakan pengambilan sampel purposif dan proporsional. Pengumpulan data menghabiskan waktu kurang lebih 8 bulan, Informasi tambahan dari kepala sekolah melalui wawancara terstruktur, data dokumenter adalah data sekunder penelitian yang digunakan sebagai pelengkap pemaknaan hasil penelitian.

Adapun faktor-faktor yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor guru itu sendiri, yaitu melihat dan mencermati bagaimana cara guru PKn dalam membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran PKn dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap Pemilu
2. Faktor siswa, yaitu melihat motivasi siswa kelas 3 yang berjumlah 40 orang, yaitu 21 orang laki-laki dan 19 orang siswa perempuan dalam memahami konsep pemilihan umum bagi pemilih pemula.

8. Posisi Studi

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) merupakan suatu *synthetic disciplines*, yang berusaha mengorganisasikan dan mengembangkan substansi

ilmu-ilmu sosial secara alamiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (NCSS) dalam Somantri, Numan, 2001:199. Lebih lanjut Soemantri menyatakan bahwa:

PIPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.(Somantri, Numan M, 2001: 74)

Pendidikan Ilmu Sosial untuk pengajaran di sekolah biasanya terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi dan kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar/SD, sedangkan untuk SMA terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi, kewarganegaraan, sosiologi dan Antropologi. PIPS harus mampu mensintesis konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu sosial tersebut, dan perlu memasukan unsur-unsur Pendidikan, Psikologi, Pembangunan dan masalah-masalah sosial yang aktual dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dewasa ini PIPS perlu memasukan bahan/materi yang bukan hanya berkenaan dengan kehidupan masyarakat, melainkan juga berkenaan dengan dampak sains dan teknologi terhadap kehidupan tatanan masyarakat setempat, nasional dan internasional. Oleh karena itu, masalah perdamaian dunia, peperangan, kemiskinan, demonstrasi dan lain-lain hendaknya menjadi perhatian PIPS.

Rekayasa pendidikan untuk pembinaan *nation building* atau pembinaan *good and democratic dan atau good socio civic behavior* merupakan keharusan dan kebutuhan setiap bangsa-negara, yang dilakukan secara terus menerus baik pada jalur pendidikan formal, informal ataupun luar sekolah. Program ini diberi label yang beragam sesuai dengan falsafah dan target harapan bangsa yang bersangkutan. Berdasar target harapan itu pula, terdapat beragam pilihan

menyangkut strategi dan metode pembelajaran, pilihan media, dan pola evaluasinya. Komponen-komponen pembelajaran tadi menuntut upaya profesional dalam pengorganisasiannya sehingga kelas PKn dan sekolah berperan sebagai laboratorium kewarganegaraan yang demokratis.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan memberi arti banyak bagi pembangunan bangsa dan negara jika tidak disertai sikap dan perilaku warganegara yang baik, demokratis, cerdas, terampil dan bertanggungjawab menuju masyarakat madani, dimana sumber daya manusia yang akan terlibat dalam keseluruhan sistem yang dibentuk dengan pendekatan yang menciptakan masyarakat yang damai, saling menghargai, memiliki sikap toleransi, demokratis, bertanggungjawab, berdisiplin dan menghormati aturan-aturan serta hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan senantiasa mengindahkan nilai-nilai/norma kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain kemajuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah kemajuan yang harus tetap dilandasi oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945

Pendidikan politik bagi warganegara khususnya siswa SMA tentu saja merupakan hal yang sangat penting mengingat siswa SMA merupakan *young citizen* yang mempunyai tanggung jawab dan hak warganegara dalam ikut serta berperan aktif dalam meneruskan cita-cita bangsa, seperti yang telah digariskan dalam berbagai kerangka kebijakan politik nampaknya semakin menjadi suatu keharusan jika bangsa Indonesia ingin memperoleh penghargaan dan diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain di dunia sebagai sebuah bangsa yang senantiasa harus diperhitungkan dalam berbagai bentuk dan aspek percaturan dunia di masa datang.

Dengan lain perkataan bahwa pendidikan kewarganegaraan selain memperkuat sifat dan karakteristik warganegara Indonesia, juga harus mampu mewujudkan cita-citanya sebagai individu warganegara dan sebagai bagian dari warga dunia yang semakin lama tidak terasa batas-batas wilayahnya.

Sedemikian pentingnya kognisi politik dalam menunjang pembangunan politik, masalah ini telah menjadi perhatian ilmuwan politik sejak lama. Khusus bagi pengembangan sistem pemerintahan demokrasi, sejak awal abad kesembilan belas telah tumbuh pengakuan dari ilmuwan politik bahwa demokrasi bertumpu pada pendidikan, tingkat pengetahuan warga dan tindakan yang bertanggung jawab atas dasar kaidah-kaidah umum. Kraus dan Davis, (1978)